

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara agraris memiliki potensi pertanian yang cukup besar dan dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan ekonomi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri, agraris memiliki tiga pengertian. Pengertian pertama adalah mengenai pertanian atau tanah pertanian. Pengertian kedua adalah mengenai pertanian atau cara hidup petani serta yang ketiga adalah bersifat pertanian.

Menurut Van Aarsten pertanian atau agraris adalah kegiatan manusia untuk memperoleh hasil bumi yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, yang disempurnakan dari waktu ke waktu untuk melestarikan atau mengembangbiakan hewan dan tumbuhan. Pertanian atau agraris adalah agroekosistem yang tidak dapat dipisahkan subsistem kesehatan maupun manusia, yang berkaitan untuk saling menopang sistem kehidupan bersama Salikin (2003).

Sebagian besar penduduk di Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, terdiri dari sektor peternakan, perikanan, dan kehutanan memiliki potensi yang sangat besar dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling prospektif dalam menopang perekonomian nasional. Bukti bahwa sektor pertanian adalah sektor yang prospektif dimana kebutuhan pangan didalam negeri dari tahun ketahun

semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk (Saragih, 2004:8). Untuk itu, adapun program yang dilakukan negara atau pemerintah untuk mendukung konsep negara agraris yang sedang berlaku di Indonesia seperti pembangunan *food estate* (baik di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara) berbasis korporasi dalam rangka penguatan sistem pangan nasional, pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor dengan model kemitraan *creating shared value (CSV)* antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan petani, serta masih banyak lagi.

Untuk lebih mendukung perkembangan program-program pemerintah pusat agar dapat tersampaikan kepada masyarakat pedesaan, maka pemerintah pusat melalui Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengaktualisasikan dan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah.

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merujuk pada peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pelaksanaan undang-undang tersebut pada pasal 1 ayat 1 memberikan kesempatan pada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta persyaratan yang diamanatkan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu kewenangan otonomi daerah di bidang pertanian.

Usaha tani di Indonesia didominasi oleh usaha tani keluarga skala kecil yang sangat lemah dalam berbagai bidang atau dengan kata lain tidak dapat berkembang mandiri secara dinamis. Petani lahan luas atau pedagan untuk memperoleh aset produktif (lahan, peralatan) modal kerja dan sarana produksi ditambah lagi kualitas sumber daya manusia yang bekerja pada sektor pertanian masih dapat dikatakan rendah. Dilihat dari tingkat pendidikan mereka masih rendah dan jarang memiliki pertanian yang dapat dikatakan cukup (Pananrangi M, 2019:36).

Banyak persoalan yang dihadapi oleh petani, mulai dari produksi, pemasaran maupun masalah sosial didalam kehidupan sehari-harinya. Menurut Mardikianto (2003:151) penyuluh pertanian disebut sebagai ujung tombak dalam proses pembangunan pertanian karena dalam proses pembangunan pertanian, keberhasilan yang sangat besar adalah peranan penyuluh. Pembangunan pertanian juga tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat atau kelompok tani di wilayah tersebut, sehingga kinerja kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa dapat menjalankan tugas memimpin dan mengkoordinasi pemerintah desa dalam melaksanakan segala urusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat desa.

Pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta mengisi dan memperlancar pasar baik pasar luar negeri, melalui pertanian yang

maju dan efisiensi yang teguh sehingga makin mampu meningkatkan mutu dan derajat pengelolaan produksi serta menunjang pembangunan wilayah.

Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan terendah dibawah kecamatan. Dalam struktur pemerintahan desa terdapat perangkat desa yang mengatur pemerintahan desa, yakni: kepala desa beserta wakilnya, Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi memusyawarahkan segala masalah yang dihadapi desa, pembantu-pembantu Kepala Desa baik Sekertaris Desa ataupun kepala-kepala urusan yang tergabung dalam pamong desa. Penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Rahardjo (Dalam Fausiah,2010:169).

Pemberdayaan petani melalui kelembagaan kelompok tani merupakan salah satu metode pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk memungkinkan mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Lembaga kecil ini merupakan suatu bentuk organisasi kerja sama yang membuat masyarakat mampu mengembangkan respon yang sesuai dengan logika dan menjadi suatu wadah yang menyatukan para petani secara horizontal maupun secara vertikal (Surasisastra 2006:34).

Dalam pemberdayaan kelompok tani di desa, peran seorang kepala desa sangat urgen dalam proses pemberdayaan kelompok tani. Menurut Poerwaderminta (1991 : 753) Peran adalah suatu yang menjadi bagian atau

pegangan pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa, Dengan kata lain sesuatu yang merupakan hak dari seseorang pemimpin dalam sebuah organisasi masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di daerah kekuasaannya. Kemudian menurut menurut Tjokroamidjojo (2000 : 42) peran kepala desa yaitu: fasilitator, mediator, dan motivator.

Kelompok tani adalah para petani yang terikat secara non-formal atas dasar keserasian, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, keakraban, kepentingan bersama dan saling mempercayai serta mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan yang bersama. Dengan bergabungnya petani dalam wadah kelompok tani dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani aggotanya agar lebih efektif, memudahkan mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya (Deptan, 2007). Kelompok tani merupakan suatu wadah tempat belajar dan bekerja sama bagi para petani untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya di dalam dunia pertanian, sejalan dengan itu maka diharapkan kedepannya peningkatan hasil pertanian akan dapat tercapai. Dalam usaha meningkatkan produksi pertanian, petani perlu ikut dalam kelompok tani.

Di Indonesia berdasarkan data dari badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian (2019), jumlah kelompok tani ada sekitar 615-575, untuk propinsi Nusa Tenggara Timur ada sekitar 31.047 kelompok tani. Dengan begitu banyaknya kelompok tani ini diharapkan dapat mewujudkan program dari otonomi daerah sendiri.

Namun dengan begitu banyaknya kelompok tani yang dibentuk, tidak menuntut kemungkinan terjadinya masalah baik dalam hal pembentukan kelompok, proses berjalanya kelompok, maupun dari unsur aparat pemerintah desa sendiri sebagai fasilitator kelompok tani di desa tersebut.

Berdasarkan Penelitian Anggreyni (2021) terjadinya masalah dalam kelompok tani yang disebabkan oleh pemerintah desa dalam hal ini kurangnya peran kepala desa dalam meningkatkan pemberdayaan di desa adalah masyarakat di desa Mobuya kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, Pada umumnya hidup dari bertani dengan potensi kekayaan alam yang menjanjikan. Kegiatan kelompok tani dapat berkembang jika adanya dukungan dari pemerintah yang melihat potensi kelompok tani yang cukup aktif dalam menciptakan inovasi-inovasi yang dapat membawa kemajuan bagi desanya. Dari aset usaha tani yang dikelola, tentunya dapat memberikan manfaat bagi anggota kelompok tani maupun bagi masyarakat.

Namun pada saat ini kondisi kelompok tani di desa Mobuya dari tahun ke tahun dapat dikatakan belum mengalami suatu perkembangan seperti sesuatu yang diharapkan atau hanya berjalan ditempat. Rendahnya suatu kinerja kelompok tani antara lain disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah desa yang ada. Kenyataan yang terjadi masih banyak anggota kelompok tani yang belum memiliki keterampilan atau kemampuan dan potensi yang begitu baik dalam menjalani dan mengelolah pertanian, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para petani, sehingga kelompok tani tidak bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan.

Hal ini disebabkan dari kurangnya pelatihan, pembinaan, pembimbingan dan penyuluhan untuk bagaimana cara-cara yang seharusnya petani dapat lakukan dalam mengelolah pertanian yang kelompok tani miliki dengan benar. Selain itu permasalahan yang terjadi yaitu pemberian bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dari para petani. Pemberian bantuan berupa benih jagung, bibit bawang putih merupakan tanaman yang tidak cocok untuk daerah kami, tanaman unggulan di Desa Mobuya yang seharusnya jika di cocokkan dengan keadaan iklim di desa Mobuya yang lebih tepat adalah tanaman Holtikultura berupa kentang, wortel, batang bawang, cabai, jahe, sawi, tomat, kol dll, serta kurangnya ketersediaan pupuk yang diberikan padahal pupuk adalah kebutuhan dan keberlangsungan petani dalam mengelolah lahan pertanian.

Dari hasil penelitian terdahulu seperti diatas, tidak jauh berbeda dengan masalah yang terjadi di Desa Tualene Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara yang terdapat 7 kelompok tani.

Oleh sebab itu keberadaan kelompok tani di pedesaan perlu di perdayakan mengingat semakin kompleks dan besarnya tantangan pangan mendatang, terutama untuk mencapai kemandirian pangan, maka kelompok tani yang tersebar diseluruh pelosok pedesaan perlu dibenahi dan diberdayakan, sehingga mempunyai keberdayaan dalam melaksanakan usaha taninya.

Untuk pelaksanaan pemberdayaan pemerintah Desa Tualene menghimbau kepada masyarakat agar dapat mengembangkan keinginan, potensi dan

kemampuan yang memiliki melalui wadah kelompok tani yang dibentuk dengan memfokuskan pada suatu bidang usaha, dapat dilihat dari kelompok-kelompok tani seperti pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Data Kelompok Tani Desa Tualene

NO	NAMA KELOMPOK TANI	KK	SK	JENIS BANTUAN	JENIS USAHA	KET
1	Dalek Esa	20	- Dalam Proses	-	Padi Sawah, Bawang merah, Lombok, tomat, terong.	Aktif
2	Permata	20	- Dalam Proses	-	Padi sawah, Buncis, sawi, kangkung, bayam.	Aktif
3	Kiak Lemurai	20	- Dalam Proses	Traktor 1 buah, motor air 1 buah.	Padi sawah, Bawang, semangka, pare, kacang Panjang.	Aktif
4	Paniti Bersatu	20	5/97/NOV/D T/2017	Traktor 1 buah, alat semprot 1 buah, Terpal 1 buah.	Padi Sawah, Semangka, pare, Lombok, tomat.	Aktif
5	Nusa Lontar	25	5/09/MEI/DT /2008	Alat semprot 1 buah.	Padi Sawah, Bawang merah, kangkung, semangka, ketimun.	Aktif
6	Tirosa	21	6/97/NOV/// DT/2017	Bibit, motor air, terpal.	Padi Sawah, kol, brokoli, semangka, buncis.	Aktif
7	Tualene Bersatu	32	05/PK/DT/20 05	Motor air 1 buah, terpal 1 buah, traktor 1 buah.	Padi, Sawah, Semangka, ketimun, kol, brokoli bawang merah.	Aktif

Sumber : Data Pembangunan Desa Tualene, 2022

Data di atas merupakan data kelompok tani dalam hal ini terdapat 7 Kelompok Tani, 158 KK, jenis bantuan, dan jenis usaha di Desa Tualene Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara. Kelompok tani yang sudah terbentuk sejak tahun 2005 itu, masih sulit untuk mengembangkan usaha

taninya karena ada beberapa hambatan seperti yang di hadapi Desa Tualene sebagai berikut: Kualitas sumber daya manusia yang terbatas sehingga berpengaruh pada produktivitas, kekurangan modal untuk dapat mengembangkan usaha taninya, kurang mendapatkan penyuluhan dari penyuluh pertanian, selain itu kepala desa Tualene dinilai kurang memberikan perhatian terhadap pengurus dan anggota kelompok tani jarang melakukan pertemuan dengan pengurus dan anggota kelompok tani, kurang memberikan motivasi kepada pengurus dan anggota kelompok tani. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari kepala desa tentang perannya dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap kelompok tani.

Dengan melihat kondisi desa saat melakukan observasi awal, yang mengindikasikan bahwa masih kurangnya peranan kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani. Maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul: **“Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Tualene Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimanakah peranan kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Tualene Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peranan kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Tualene Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani dan perkembangan ilmu pengetahuan sosial di masa yang akan datang, terutama ilmu Administrasi Negara.

b. Manfaat Praktis

1. Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran bagi pemerintah desa khususnya dalam hal pemberdayaan kelompok tani

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas bagi masyarakat tentang peran kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani

3. Peneliti lain

Sebagai informasi bagi peneliti-peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam memberdayakan kelompok tani.